

DAPATKAH QUASI ELIT PEREMPUAN ADAT BERBICARA?

Dien Vidia Rosa¹, Hery Prasetyo²

¹Universitas Jember, dien.fisip@unej.ac.id

²Universitas Jember, herypras.fisip@unej.ac.id

ABSTRAK

Studi ini mengeksplorasi quasi elit perempuan adat dalam upaya memperjuangkan identitas kultural dan hak masyarakat adat Tengger melalui perspektif poskolonialisme Gayatri Spivak. Istilah quasi elit digunakan untuk menggambarkan sifat semu (secara politik) dan melekat pada posisi perempuan adat yang mampu mengelola ritual dan adat namun tidak terformalisasi secara struktural. Seringkali, kajian tentang masyarakat adat secara umum menjelaskan masyarakat adat, khususnya perempuan, sebagai yang marginal, terutama berkaitan dengan perbatasan teritorial dan penggunaan lahan, akses dan pengelolaan terhadap sumber daya, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan. Namun, persoalan perjuangan pemimpin masyarakat adat belum banyak disinggung. Secara spesifik mengenai keterlibatan quasi elit perempuan adat dalam menyuarkan identitas kultural dan hak masyarakat adat. Penelitian ini menggambarkan kuasa dari quasi elit perempuan adat Tengger untuk meneguhkan dan melindungi identitas kultural melalui ritual dan tradisi masyarakat adat Tengger. Mbok Dhandhan merupakan figur perempuan adat yang bukan hanya membantu Romo Dukun, namun juga memastikan prosesi ritual berjalan sesuai dengan pakem adat. Selain itu, terdapat Wong Munjung, perempuan yang bertugas mengelola kebutuhan logistik agar setiap kegiatan adat terpenuhi. Studi ini berbasis pada penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka dan etnografi yang meliputi observasi dan wawancara.

Kata kunci: Hak masyarakat adat; Identitas kultural; Perempuan adat; Poskolonial; Quasi elit

1. PENDAHULUAN

Posisi perempuan adat memiliki kontribusi signifikan dalam penyelenggaraan ritual, tradisi serta tata kelola masyarakat adat. Diskursus perempuan adat dalam menegaskan identitas kultural dan hak ulayat dilihat sebagai upaya penting menyuarkan kepentingan masyarakat adat. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan perjuangan perempuan adat di beberapa wilayah belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Persoalan struktur kelas dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan posisi perempuan belum sepenuhnya menjadi perhatian. Sebuah studi bahkan menemukan perempuan adat non-elit dihadapkan pada eksklusivitas berlapis yang merugikan dirinya dan masyarakat adat tempatnya bernaung (Ramdhaniaty, 2018). Perempuan adat melalui konsep subaltern Spivak perlu dijelaskan sebagai subjek yang tidak terstruktur secara formal sehingga suaranya direpresentasikan oleh anggota kelas dominan, yaitu laki-laki dan pemangku adat. Sedangkan dalam artikulasi kebudayaan, terdapat perempuan adat yang menjalankan fungsi sebagai pemimpin, yang dalam penelitian ini disebut sebagai quasi elit, adalah mereka yang memegang posisi utama dalam pelaksanaan ritual namun dikaburkan secara politis demi kepentingan elit dominan.

Masyarakat adat Tengger dikenal mempunyai prinsip egaliter atau setara dalam melihat subjek laki-laki dan perempuan. Perempuan Tengger, sama dengan laki-laki Tengger, berbagi pekerjaan domestik dan publiknya sesuai kebutuhan. Perempuan Tengger melakukan aktivitas pertanian, seperti menanam, mencangkul, memberi pupuk, menyiangi, dan lainnya yang juga dikerjakan oleh laki-laki (Setiawan, 2008). Mereka juga terlibat dalam pekerjaan lain semisal sektor pariwisata (Sasongko, 2013) dan merupakan kelompok masyarakat yang patuh pada peraturan adat. Dalam struktur formal dan politik, pemangku adat didominasi oleh laki-laki.

Dukun sebagai tokoh adat sentral masyarakat Tengger disebut sebagai Dukun Pandhita yang memimpin ritual atau tradisi. Selain Dukun Pandhita juga terdapat pembantu dukun dan pesuruh dukun yang membantu mempersiapkan peralatan saat ritual berjalan. Sementara itu, perempuan adat tidak pernah menempati posisi sebagai Dukun Pandhita. Meskipun, terdapat perempuan adat yang menempati posisi sebagai Mbok Dhandhan dan Wong Munjung yang merupakan jabatan prestisius dalam pelaksanaan tradisi.

Perspektif poskolonialisme menawarkan anti-kolonialisme dengan membongkar konsekuensi ideologi, gagasan serta upaya kolonial sebagai kekuasaan dominan dan hegemonik yang menentukan dunia jajahan. Said (1978) membicarakan poskolonialisme dalam konteks relasi dunia Barat dan dunia Timur, bahwa Timur terbentuk dari referensi yang diciptakan oleh Barat. Oleh sebab itu, subjek dunia Timur tidak mengenali identitasnya karena terselubungi pengetahuan dunia Barat. Sementara, Spivak (2010) memetakan relasi kekuasaan, terutama, antara subjek perempuan marginal dengan subjek diluar dirinya. Spivak mengamati bahwa agenda untuk menjauhkan subjek dari identitasnya terjadi secara sistematis dan kompleks, tanpa ruang bagi subjek untuk bersuara. Dengan demikian, subaltern digunakan untuk menganalisis posisi perempuan adat sebagai quasi elit dalam masyarakat Tengger, yaitu perempuan adat yang berkapasitas memimpin bagian dari ritual dan memastikan tahapan prosesi adat.

Perempuan adat yang terlibat sebagai pemimpin bagian ritual ataupun tradisi hampir tidak dimunculkan dalam legitimasi formal dan diasumsikan merupakan posisi yang kurang strategis secara politik. Mereka menjadi pelengkap dalam melalui konsepsi kesetaraan yang menandai bentuk partisipasi aktif sebagai pendamping laki-laki. Padahal, posisi sebagai quasi elit diimajinasikan dapat lebih leluasa bernegosiasi dalam menyuarakan kebutuhan perempuan dan masyarakat adat pada umumnya. Meskipun tugas yang dijalankan dalam ritual adat sangat penting, persoalan rekognisi perempuan adat hampir tidak disinggung. Oleh karenanya, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana quasi elit perempuan adat menyuarakan identitas kultural masyarakatnya?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan diskursus perempuan adat, utamanya quasi elit perempuan adat sebagai subjek yang mendorong isu partisipasi perempuan adat dalam meneguhkan identitas kultural masyarakat Tengger melalui ritual adat. Studi ini berbasis pada penelitian kualitatif dengan pendekatan poskolonialisme, yaitu pendekatan yang menekankan bentuk penyadaran atas kolonialisme (Anggraini, 2018). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan poskolonialisme digunakan untuk memposisikan perjuangan quasi elit perempuan adat dalam menyuarakan kepentingan identitas kulturalnya. Quasi elit perempuan adat didiskusikan melalui konsep subaltern dari Spivak yang menelisik posisi esensial perempuan adat yang tidak terlihat dalam struktur politik adat. Metode pengumpulan data studi ini meliputi observasi dan wawancara.

Penelitian ini berlokasi di desa Kandangan, Selogendhing, Lumajang dan dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Perempuan adat yang dijumpai adalah istri Romo Dukun, istri pemangku adat, istri ketua RT, Mbok Dhandhan, dan beberapa perempuan masyarakat Tengger lainnya.

3. ANALISIS DATA

Kesetaraan gender pada masyarakat adat Tengger yang jamak dihasilkan penelitian terdahulu terkonfirmasi melalui penelitian ini. Perempuan dan laki-laki bekerjasama dan berbagi peran serta fungsi sosial berlandaskan ajaran dan nilai-nilai adat. Secara spesifik, sosok dan cerita rakyat Roro Anteng menjadi panutan perempuan Tengger dalam menjalani rutinitas kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Mereka meyakini bahwa kekuatan dan keteguhan

sosok ibu yang digambarkan melalui Roro Anteng dapat membawa keharmonisan dan keselarasan.

Keseimbangan dalam bidang pekerjaan dapat dilihat pada sektor domestik seperti merawat anak dan pada sektor publik semisal bekerja di lahan pertanian, yang dikerjakan secara bersama maupun bergantian oleh laki-laki dan perempuan. Begitu pula dengan aktivitas merokok yang pada beberapa masyarakat hari ini dilihat sebagai hal yang tidak direkomendasikan karena berkaitan dengan tabu bagi perempuan dan persoalan kesehatan. Namun, perempuan Tengger di desa tertentu melakukan aktivitas merokok sama dengan laki-laki sebagai bagian dari budaya yang memiliki makna mengukuhkan persaudaraan, dan ketika berladang (menghadapi hama dan cuaca dingin) karena dapat menghangatkan tubuh sekaligus mengusir *mrutu* (Afifudin, dkk, 2018).

Posisi perempuan adat sedemikian strategis, khususnya berhubungan dengan ritual adat desa. Sejumlah tradisi yang dijalankan antara lain Yadnya Kasada, Unan-Unan, Karo, maupun Walgara, tidak dapat dipungkiri mengikat partisipasi perempuan, terutama perempuan yang memiliki kapasitas dan tugas mengemban amanah adat. Beberapa perempuan mendapatkan sebutan secara khusus, seperti Mbok Dhandhan dan Wong Munjung. Keduanya merupakan karakter penting dalam pelaksanaan ritual adat desa. Beberapa perempuan adalah istri Romo Dukun, istri pemangku adat, maupun istri perangkat/pemerintahan desa yang turut berkolaborasi demi kelancaran ritual.

Mbok Dhandhan mendampingi Romo Dukun selama pelaksanaan ritual, semisal Walgara, dan bertanggungjawab untuk memastikan prosesi ritual berjalan sesuai dengan pakem dan aturan adat. Posisinya sangat penting karena Mbok Dhandhan adalah orang yang mampu menghafal urutan rangkaian prosesi yang harus dilakukan dan bersama istri Romo Dukun menyiapkan dan memeriksa sesajen dan segala material perlengkapan ritual. Terkadang Romo Dukun lupa urutan prosesi ritual sehingga Mbok Dhandhan yang mengingatkan dan membimbing Romo Dukun untuk melangkah selama prosesi. Romo Dukun mengungkapkan:

Untuk persiapan ritual ke leluhur apa yang harus dipersiapkan, itu tugasnya Mbok Dhandhan. Nanti tahu. Makanan apa yang harus disajikan, apa namanya, ada pisang Ayu, kalau jenang kan bubur. Kalau orang sini menyebutnya Jenang putih, jenang merah. Di pisang Ayu ada kinangan... Pisang Ayu sebagai saksi... (Romo Dukun Gatot, Kandhangan, 10 Maret 2023)

Legitimasi Romo Dukun pada posisi Mbok Dhandhan secara tidak langsung menegaskannya sebagai quasi elit perempuan adat. Pada ruang ini subalternitas menjadi cair dan dapat menjadikan posisi bernegosiasi bagi perempuan adat.

Sementara itu, Wong Munjung memiliki tugas *noto sego* (menata nasi) dan merupakan klasifikasi tertinggi yang membanggakan dalam *bethek* atau *biodo* (perkumpulan perempuan yang mempersiapkan hajatan atau ritual). Keahlian Wong Munjung diuji pada setiap acara ritual sehingga hal ini menjadi pertarungan reputasi. Wong Munjung harus cekatan dan pandai dalam mengatur konsumsi sehingga tamu dan tuan rumah merasa puas karena ketepatan dalam memberikan suguhan (Aliffiati dan Kaler, 2020).

Dalam pelaksanaan ritual atau tradisi masyarakat Tengger, perempuan dengan bermacam status yang melekat pada dirinya berpartisipasi mempersiapkan jauh-jauh hari dan memahami kebutuhan prosesi ritual yang akan berlangsung sampai selesainya acara. Hal ini menjadi penting dalam menegaskan posisi mereka sebagai subjek yang menguatkan identitas kultural dan sebagai bagian dari politik identitas yang dijalankan. Namun beberapa persoalan muncul terkait quasi elit perempuan adat yang berada dalam ruang antara pengakuan.

Suatu persoalan terkait tradisi *petekan* atau *pete'an* dapat dianalisis sebagai bentuk dilema quasi elit perempuan adat. *Pete'an* adalah tradisi masyarakat Tengger dimana bagian tubuh perempuan (wilayah sekitar perut) ditekan oleh dukun untuk melihat apakah perempuan tersebut sedang hamil atau tidak, masih perawan atau tidak. Terdapat dua narasi yang

dikonstruksi pada tradisi tersebut. Pertama, tradisi *pete'an* membawa nilai kebajikan ketika mengkarakteristikan perempuan Tengger sebagai garda depan keharmonisan karena perempuan Tengger adalah perempuan baik-baik yang menjaga kehormatannya (Ramiyati, dkk, 2022). Sementara narasi kedua melihat tradisi *pete'an* sebagai bagian dari kontrol tubuh perempuan dan pendisiplinan seksualitas perempuan agar menjadi tubuh yang patuh (Frenzia, 2021). Salah satu konsekuensi yang muncul adalah marginalisasi perempuan karena terbatas hak atas tubuhnya, terutama ketika sanksi adat tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan.

Melalui diskursus perempuan adat dan pelaksanaan tradisi di atas, posisi quasi elit perempuan adat dipertanyakan. Apakah mereka dapat menyuarakan kepentingan masyarakat secara setara, terlebih yang berkaitan dengan kepentingan perempuan? Beberapa pandangan dalam studi feminis menyatakan bahwa perempuan tidak mendapatkan keberpihakan baik secara peraturan maupun kebijakan yang dibuat oleh kelas penguasa yang dominan ditempati oleh laki-laki.

Dalam ruang kesetaraan, perempuan masih menghadapi persoalan rekognisi dan akses kekuasaan. Sebagai contoh, perubahan daerah adat Tengger melalui komodifikasi budaya berjalan selaras dengan wisata ekologis selama beberapa waktu. Istriyani (2021) menjelaskan agenda wisata telah membentuk waktu senggang dan berkontribusi pada transformasi tempat menjadi pusat wisata yang lebih komersil, yang bertujuan untuk memaksimalkan daya tarik konsumen. Proyek pengembangan pariwisata wilayah adat Tengger melibatkan perempuan adat walaupun terbatas pada pekerjaan tertentu. Sungguhpun demikian, partisipasi perempuan adat bermotif membantu suami dan bergerak pada sektor informal. Sedangkan kesempatan kesetaraan dalam ruang pekerjaan yang lebih baik, misalnya di sektor formal akan mendukung upaya penciptaan ruang dan sektor ekonomi berbasis pariwisata kultural yang lebih inklusif.

Subjek subaltern, yaitu perempuan adat yang mengalami marginalisasi perlu direpresentasikan oleh elit perempuan adat. Dalam penelitian ini, elit perempuan adat Tengger belum mendapatkan legitimasi formal sehingga kemudian disebut sebagai quasi elit. Forum formal pada tingkat kelembagaan masyarakat seperti desa maupun yang lebih tinggi seperti DPRD, belum memperlihatkan subjek perempuan adat yang hadir dan bersuara. Melalui pertimbangan situasi tersebut, elit perempuan adat hanya muncul dalam pelaksanaan ritual atau tradisi desa. Sedangkan ketidakhadiran elit perempuan adat dalam forum formal kelembagaan mempunyai konsekuensi belum munculnya suara perempuan adat, baik secara umum maupun spesifik. Dengan demikian, kondisi subaltern hadir bagi quasi elit perempuan adat Tengger dalam bentuk yang agak berbeda dari perempuan adat non-elit.

Gramsci (2013) menjelaskan konsep hegemoni sebagai suatu ketertundukan yang disepakati oleh pihak yang menghegemoni maupun yang terhegemoni. Sebagai pihak yang terhegemoni, konsensus atau persetujuan diperoleh bukan dari dominasi kekuasaan melainkan relasi ideologi atau politik. Quasi elit perempuan adat merupakan posisi antara yang dapat menggambarkan bagaimana elit perempuan adat Tengger sedang memperjuangkan identitas kulturalnya. Peneguhan ruang melalui keahlian dan memori tata cara ritual adalah bagian dari artikulasi dan praktik budaya quasi elit perempuan adat. Namun di sisi lain, ketidakbersuaan mereka menjadi ambiguitas dalam perjalanan rekognisi. Diam dapat dilihat sebagai upaya memunculkan ruang multitafsir, baik sebagai bentuk perlawanan maupun kepatuhan semu pada hegemoni.

4. KESIMPULAN

Perempuan-perempuan dengan posisi strategis dalam masyarakat adat Tengger menjadi titik penting rantai informasi apapun yang menyangkut kehidupan beradat. Relasi mereka dengan perempuan adat non elit atau yang diluar mereka adalah upaya untuk menjalin kekuatan dan mengamankan ruang artikulasi identitas kultural. Legitimasi maupun rekognisi adalah perjuangan perempuan adat untuk menyuarakan kepentingan perempuan dan masyarakat yang

dalam penelitian ini dilakukan oleh quasi elit perempuan adat dengan cara menegaskan akses atas ruang kultural.

Namun disisi lain, perempuan dengan posisi strategis ini belum terlihat untuk terlibat berdiskusi secara intens dengan pemangku adat. Dengan demikian, secara politis, perempuan adat tersebut berada dalam posisi quasi (semi) yang dipertanyakan dalam bersuara dan merepresentasikan suara yang lain. Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi gagasan elit perempuan adat untuk memperluas akses kultural dalam ranah pemangku adat yang dominan. Alternatif subtema penelitian yang lain adalah cara yang dilakukan oleh elit perempuan adat agar dapat menyuarakan kepentingan perempuan adat maupun masyarakat adat secara umum.

Pengakuan

Penelitian ini merupakan bagian dari riset payung bertemakan masyarakat adat dengan pendanaan dari BRIN dan LP2M Universitas Jember. Penulis menyampaikan terima kasih pada kedua donor dan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian, antara lain masyarakat adat Tengger Lumajang dan CHRM2 Universitas Jember.

REFERENSI

- Afifudin, Luqman, Fatwa Sari Tetra Dewi dan Retna Siwi Padmawati. 2018. *Budaya Merokok Wanita Suku Tengger*. (Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat Vol 34 No. 11 November 2018). Yogyakarta; Universitas Gadjah Mada. Diakses pada 22 Juni 2023 di <https://media.neliti.com/media/publications/380301-none-fe77147e.pdf>
- Aliffiati dan I Ketut Kaler. 2020. *Struktur Kelas dan Otonomi Perempuan Tengger Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang*. (Jurnal Studi Budaya Nusantara Vol. 4, No. 1).
- Anggarini, Ade Eka. 2018. *Postmodernisme dan Poskolonialisme dalam Karya Sastra*. (Jurnal Pujangga Vol. 4, No. 1).
- Frenzia, Angela. 2021. *Tradisi Petekan: Tubuh Perempuan yang Dihormati atau Dipatuhkan?* Diakses pada tanggal 22 Juni 2023 di <https://gshrudayana.org/2021/02/07/tradisi-petekan-tubuh-perempuan-yang-dihormati-atau-dipatuhkan/>
- Gramsci, Antonio. 2013. *Catatan-catatan dari Penjara*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Istriyani, Ratna. 2021. *Consuming Leisure Time*. (Journal of Contemporary Sociological Issues, Vol. 1 No. 1).
- Ramdhaniaty, Nia. 2018. *Perempuan Adat Non Elit, Eksklusi Berlapis, dan Perjuangan Hak Kewarganegaraan atas Hutan Adat (Studi Kasus Di Masyarakat Adat Kasepuhan Karang, Lebak, Banten)*. Tesis. Jakarta; Universitas Indonesia.
- Ramiyati, Asmi, Feri Choirun Nisa, Swa Sekar Jakti, Pande Made Kutaneegara. *Manifestasi Folklore Roro Anteng: Signifikansi Peran Perempuan dalam Kehidupan Masyarakat Tengger*. (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 11, No. 1).
- Said, Edward W. 1978. *Orientalism*. New York; Pantheon Books.
- Sasongko, R. Widodo Djati. 2013. *Peningkatan Peran Ganda Wanita Tengger dalam Kegiatan Pariwisata Gunung Bromo*. (Jurnal Cakrawala, Vol. 8 No. 1).
- Setiawan, Ikwan. 2008. *Perempuan di Balik Kabut Bromo: Membaca Peran Aktif Perempuan Tengger dalam Kehidupan Rumah Tangga dan Masyarakat*. (Jurnal Humaniora Vol. 20, No. 2)
- Spivak, Gayatri Chakravorty. 2010. *Can the Subaltern Speak?: Reflections on the History of an Idea*. New York; Columbia University Press.